



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



**KETUA
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA**



IRFANUDIN, S.H., M.H.

PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada Tim Penyusun sehingga Laporan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2019 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni selama tahun 2019. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA : "SIMPATIK", yakni: Sinergi Integritas Mandiri Profesional Akuntabel Transparan Inovatif dan Kompeten menuju Pengadilan Negeri Cibinong yang Terbaik.

Demikianlah Laporan Tahunan ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Bogor selama tahun 2019. Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kami lakukan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan demi terciptanya pelayanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Cibinong.

Kami berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih.

Cibinong, 13 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



IRFANUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19630808 199212 1 001



D A F T A R I S I

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	1
B. VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU, BUDAYA KERJA dan MOTTO.....	4
C. WILAYAH YURIDIKSI.....	6
D. RENCANA STRATEGIS	7
 BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG	 9
B. PENYELESAIAN PERKARA	10
1. Perkara Pidana	10
2. Perkara Perdata	17
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN	19
1. Posbakum.....	19
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	23
A. Pelayanan Hak Identitas Hukum di Kab Cibinong.....	23
B. Pelayanan Sidang Tilang di Tempat	26
3. Perkara Prodeo	27
 BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	 29
A. SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNIS YUDISIAL	29
B. SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG STRUKTURAL	29
C. KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	31
D. KEBUTUHAN/USULAN PERMINTAAN SDM	31
E. PROMOSI DAN MUTASI DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG..	32
F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIIKUTI OLEH HAKIM DAN PEGAWAI	34

BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	41
A.	PENGELOLAAN KEUANGAN	41
B.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	43
1.	Sarana dan Prasarana Gedung	43
2.	Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan	56
3.	Bidang Perpustakaan.....	56
4.	Bidang Barang Milik Negara (BMN).....	56
5.	Bidang Keamanan	60
C.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	61
1.	Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Cibinong	61
2.	Implementasi Era Terang pada Pengadilan Negeri Cibinong	63
3.	Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Cibinong	65
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	67
A.	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	67
B.	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	69
BAB VI	PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI	74
A.	PENGAWASAN INTERNAL	74
B.	EVALUASI.....	77
BAB VII	PENUTUP	79
A.	KESIMPULAN	79
B.	SARAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2019	10
Tabel 2	Jenis Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2019	11
Tabel 3	Data Upaya Hukum terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2019	12
Tabel 4	Upaya Hukum terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2019	16
Tabel 5	Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2019	17
Tabel 6	Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019	18
Tabel 7	Data Upaya Hukum terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019	19
Tabel 8	Perkara Permohonan pada Sidang Keliling Kecamatan Citeureup	25
Tabel 9	Sidang Tilang ditempat Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan TA 2019	26
Tabel 10	Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2019	28
Tabel 11	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial	29
Tabel 12	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong	30
Tabel 13	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Cibinong	31
Tabel 14	Usulan Aparatur Sipil Negara pada PN Cibinong	32
Tabel 15	Data Hakim yang Promosi dan Mutasi ke Pengadilan Lain selama Tahun 2019	32
Tabel 16	Data Pegawai yang Melaksanakan Tugas di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama Tahun 2019	33
Tabel 17	Data Pegawai yang Promosi dan Mutasi ke Pengadilan Lain selama Tahun 2019	33

Tabel 18	Data Pegawai yang Pensiun selama Tahun 2019	34
Tabel 19	Data Hakim dan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	35
Tabel 20	DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2019	41
Tabel 21	Revisi DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2019	42
Tabel 22	Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2019	57
Tabel 23	Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2019	58
Tabel 24	Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019	59
Tabel 25	Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019	59
Tabel 26	Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Cibinong	68

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Gambar 1	Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	7
Grafik 1	Persentase Perkara Pidana Tahun 2015 – 2019	11
Gambar 2	Foto Bersama YBH Amalbi dengan Keluarga Besar PN Cibinong	22
Gambar 3	Foto Kegiatan YBH Amalbi PN Cibinong	23
Gambar 4	Pelayanan Hak Identitas di Kecamatan Citeureup	24
Gambar 5	Pelayanan Hak Identitas di Kecamatan Citeureup	24
Gambar 6	Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	43
Gambar 7	Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	43
Gambar 8	Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	44
Gambar 9	Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	44
Gambar 10	Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	45
Gambar 11	Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	45
Gambar 12	Area Merokok Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA	46
Gambar 13	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	48
Gambar 14	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	48
Gambar 15	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	49
Gambar 16	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	49
Gambar 17	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	50
Gambar 18	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	50
Gambar 19	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	51
Gambar 20	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	51
Gambar 21	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	52
Gambar 22	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	52
Gambar 23	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	53
Gambar 24	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	53
Gambar 25	Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong	54
Gambar 26	Ruang Kerja Ketua	54
Gambar 27	Ruang Kerja Wakil Ketua	55
Gambar 28	Ruang Kerja Wakil Ketua	55
Gambar 29	Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cibinong Kelas IA	61

Gambar 30	Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) PN Cibirong Kelas IA	62
Gambar 31	Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cibirong Kelas IA pada Mahkamah Agung RI	63
Gambar 32	Proses Sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Cibirong Kelas IA	63
Gambar 33	Tangkap Layar Jumlah Surat Keterangan yang Masuk pada Aplikasi Era Terang PN Cibirong Kelas IA	64
Gambar 34	Tangkap Layar Peta Aplikasi Era Terang PN Cibirong	66
Gambar 35	<i>Launching</i> Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Cibirong Kelas IA	72
Gambar 36	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Cibirong Kelas IA	72
Gambar 37	Petugas PTSP PN Cibirong Kelas IA	73
Gambar 38	Sistem Antrian PTSP PN Cibirong Kelas IA	73



BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

- 1) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
- 2) Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.



- 3) Dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang undang.
- 4) Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- 5) Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :
 - Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas Keadilan.
 - Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
 - Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
 - Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
 - Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
 - Putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya khususnya Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sejak dicanangkannya pelaksanaan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu bagi setiap lingkungan peradilan yaitu setiap pengadilan dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam bidang pelayanan publik secara terukur dan transparan maka Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mulai berbenah diri untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang



Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Berbagai Kegiatan dan program pembaharuan telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong, tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Jumlah Hakim dan pegawai yang sesuai dengan Kompetensinya, Sumber Daya Manusia aparat Pengadilan baik kualitas maupun kuantitas, serta hal hal lain yang mendukung kegiatan dan program yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang tersebut diatas.

Selain hal tersebut diatas sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA ada program prioritas yaitu :

1. Program Keterbukaan Sistem Informasi dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah disediakan sarana :
 - a. Website dengan alamat www.pn.cibinong.go.id ;



- b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat www.sipp.pn.cibinong.go.id
2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan Pada program ini Pengadilan Negeri Cibinong telah mempunyai Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meja Pelayanan Penjadwalan Sidang.

B. VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU, BUDAYA KERJA dan MOTTO

Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIBINONG YANG AGUNG"

1. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

2. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi



kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
- Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

3. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Cibinong adalah berdasarkan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN**, dimana segenap aparatur pengadilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

1. adil dan tidak diskriminatif;
2. cermat;
3. santun dan ramah;
4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. profesional;
6. tidak mempersulit;
7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Cibinong;
9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;



11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. sesuai dengan kepantasan; dan
15. tidak menyimpang dari prosedur.

4. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah "SIMPATIK", Sinergi Integritas Mandiri Profesional Akuntabel Transparan Inovatif Kompeten.

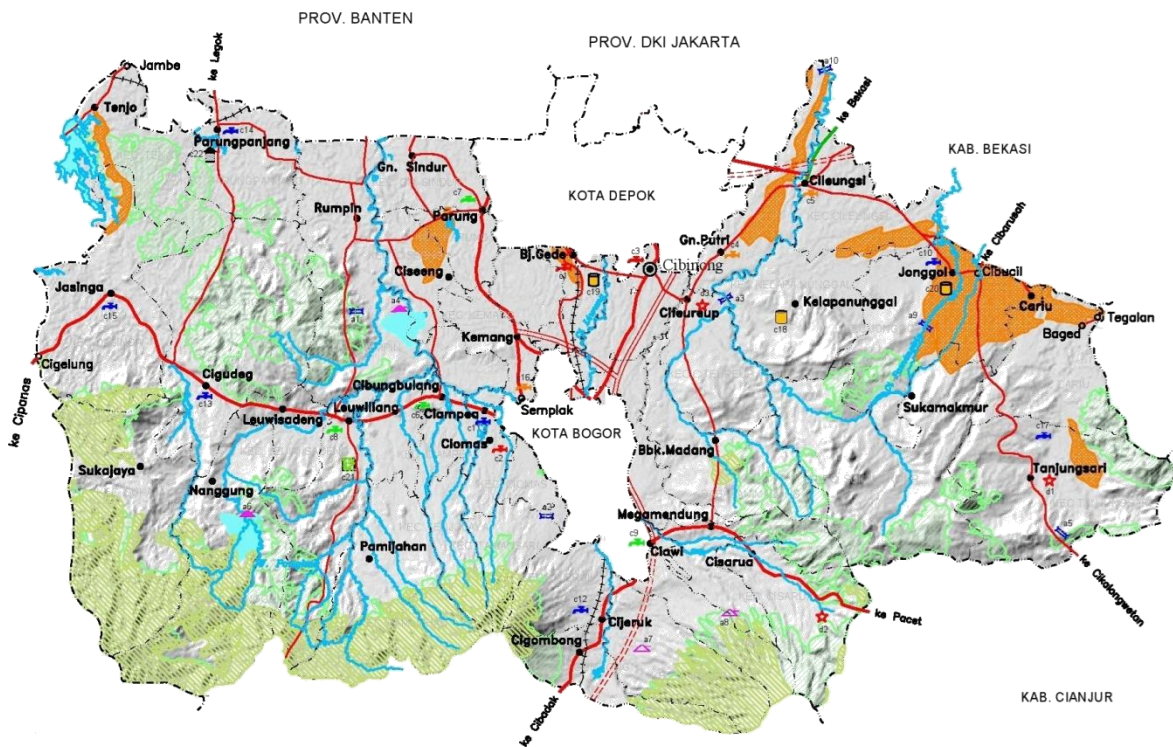
C. WILAYAH YURIDIKSI

Pengadilan Negeri Cibinong merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas $\pm 298.838,31$ Ha. Secara geografis terletak di antara $6^{\circ}18'0''$ $6^{\circ}47'10''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}23'45''$ $107^{\circ}13'30''$ Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir.

Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500 - 1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000 – 2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000 – 2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu. Batas wilayah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur;
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Gambar 1.
Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



D. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu Perencanaan Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Negeri Cibinong telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap II yakni periode 2015-2019



yang tiap tahunnya dilakukan reviu untuk dilakukan perbaikan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tersebut juga tidak terlepas dari Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, diharapkan agar antara Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program pembangunan di bidang hukum.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.



BAB II



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil menyelesaikan 6.7109 perkara pidana dari 6.7238 perkara pidana (99,80%). Sedangkan untuk Perkara Perdata, telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.075 Perkara dari 1.288 perkara perdata (94,79%).

Sebagai Pengadilan Negeri Percontohan (*Pilot Project*) Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil melaksanakan pengadministrasian yang baik terhadap perkara pidana anak yang diterimanya. Dari 21 perkara anak, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikannya 21 perkara secara tepat waktu (100%).

Dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, Pengadilan Negeri Cibinong telah berhasil menyelesaikan 248 perkara melalui mediasi, dengan hasil damai 2 perkara. Dengan demikian keberhasilan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi mencapai 0,93%

Untuk lebih jelas, berikut tabel keadaan perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2019.



B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Perkara Pidana

Berikut adalah data perkara pidana selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA :

- Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2019 sebanyak 67.238 perkara, yang terdiri dari 149 perkara sisa tahun 2018 dan 67.089 perkara baru Tahun 2019.
- Dari 67.238 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 67.109 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2019 mencapai 99.80%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil menyelesaikan 771 Perkara dari 898 yang ditangani atau mencapai 85,85%. Terdapat 127 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2019.
- Untuk program tunggakan minutasi, dari 67.111 Perkara Pidana yang telah diputus, 66.959 perkara telah berhasil minutasi (99,77%).
- Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 yang masih berjalan sampai akhir tahun 2019 sebanyak 127 Perkara.

Dibawah ini adalah tabel Penyelesaian Perkara Pidana di Tahun 2019

Tabel 1. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Diterima 2019	Putus 2019	Minutasi 2019	Minutasi		Sisa 2019
					< 14 hr	> 14 hr	
Perkara Pidana							
- Biasa/Khusus (diluar perkara anak)	149	711	734	582	582	-	126
Perkara Anak	0	21	21	21	21	0	0
Singkat							
Lalulintas	0	66340	66340	66340	66340	0	0
- Tindak Pidana Ringan	-	-	-	-	-	-	-
Pra Peradilan	0	17	16	16	16	-	1
Total	149	67089	67111	66959	66959	0	127



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam 5 tahun terakhir yang disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Grafik 1. Persentase Perkara Pidana Tahun 2015 2019



**Tabel 2. Jenis Putusan Perkara Pidana Anak
(Anak sebagai Pelaku) Tahun 2019**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Pelaku
1.	Pidana Penjara	21	28
2.	Pelatihan Kerja di Panti Rehabilitasi	-	-
3.	Dikembalikan kepada Orang Tua		
	Jumlah	21	28



**Tabel 3. Data Upaya Hukum
Terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2019**

No	Nomor Dan Tanggal Surat	Nama Anak	Pasal	Tanggal Kesepakatan	Tanggal, No Penetapan	Tanggal, Pelaksanaan Isi Diversi
1	B/17/1/2019/UNIT RESKRIM DAN 15 Januari 2019	Muhammad Sandillah Als Sandi	Tindak Pidana Pertolongan Jahat Pasal 480 Kuhp	9 Januari 2019	15 Januari 2019 Dan 1/Pen-Div/2019/Pn Cbi	15 Januari 2019
2	2/Pen.Div/2019/PN Cbi jo 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbi DAN 23 MEI 2019	Imam Sahdi Bin Slamet	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kuhp	27 Mei 2019	27 Mei 2019 2/Pen.Div/2019/Pn Cbi	27 Mei 2019 Dan Proses Sidang
3	3/Pen.Div/2019/PN Cbi jo 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbi DAN 19 JUNI 2019	AHMAD NAOPAL BIN AMIR FAUZI	pasal 80 ayat 2 UURI No.23 Tahun 2002 jo pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU pasal 351 ayat 2 KUHP	24 JUNI 2019	24 JUNI 2019 3/Pen.Div/2019/PN Cbi	24 JUNI 2019 DAN DIVERSI TIDAK BERHASIL
4	4/Pen.Div/2019/PN Cbi jo 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbi DAN 20 JUNI 2019	MUHAMMAD ANDI RENALDI BIN USEP RIADI	Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 ATAU KEDUA: Pasal 82 ayat	24 JUNI 2019	24 JUNI 2019 4/Pen.Div/2019/PN Cbi	24 JUNI 2019 DAN DIVERSI TIDAK BERHASIL



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

			(1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 ATAU KETIGA: Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012			
5	5/Pen.Div/2019/P N Cbi jo 4/Pid.Sus Anak/2019/PN Cbi DAN 24 JUNI 2019	MUHAMMAD RIZKI ALS BEBEK BIN DARUS	KESATU: Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU KEDUA: Pasal 184 ayat (4) KUHP ATAU KETIGA: Pasal 351 AYAT (3) KUHP	2 JULI 2019	2 JULI 2019 5/Pen.Div/2019/PN Cbi	2 JULI 2019 DIVERSI TIDAK BERHASIL
6	6/Pen.Div/2019/P N Cbi 2 SEPTEMBER 2019	ADITYA FADILAH BIN SUGIONO	Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban mengalami luka berat dan kemudian meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal	19 AGUSTUS 2019	19 AGUSTUS 2019 6/Pen.Div/2019/PN Cbi	19 AGUSTUS 2019 DIVERSI BERHASIL



			310 (4) UU RI No. 22 Th, 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
7.	8/Pen.Div/2019/PN Cbi jo 14/Pid.Sus Anak/2019/PN Cbi 20 SEPTEMBER 2019	1. MUHAMMAD RIZKY THALIB ALS PITAK BIN ATALIB ADJEN 2. ERZA ARDIANS YAH ALS JAUNG BIN ANWAR	Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.	24 SEPTEMBER 2019	20 SEPTEMBER 2019 8/Pen.Div/2019/PN Cbi	20 SEPTEMBER 2019 DIVERSI TIDAK BERHASIL
8.	7/Pen.Div/2019/PN Cbi jo 13/Pid.Sus Anak/2019/PN Cbi 20 SEPTEMBER 2019	RANGGA SUKMAWIJA YA ANGGA BIN ADI WIJAYA	Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP	24 SEPTEMBER 2019	20 SEPTEMBER 2019 7/Pen.Div/2019/PN Cbi	20 SEPTEMBER 2019 DIVERSI TIDAK BERHASIL
9.	9/Pen.Div/2019/PN Cbi 21 OKTOBER 2019	CARLO DHEANDRA APRIYADI BIN APRIYADI	Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4), (2) UU LAJ No.22 Tahun 2009	15 OKTOBER 2019	21 OKTOBER 2019 9/Pen.Div/2019/PN Cbi	21 OKTOBER 2019 DIVERSI BERHASIL
10.	10/Pen.Div/2019/PN Cbi jo 16/Pid.Sus Anak/2019/PN Cbi 23 OKTOBER 2019	HAMDIAN ALS HAMID ALS RIBUT	Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.	6 SEPTEMBER 2019	23 OKTOBER 2019 10/Pen.Div/2019/PN Cbi	23 OKTOBER 2019 DIVERSI BERHASIL



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

11.	11/Pen.Div/2019/ PN Cbi jo 17/Pid.Sus Anak/2019/PN Cbi 24 OKTOBER 2019	MOCH. RAFLIANSYA H BIN AHMAD	Pasal 378 KUHP. ATAU KEDUA : Pasal 372 KUHP.	28 OKTOBER 2019	24 OKTOBER 2019 11/Pen.Div/2 019/PN Cbi	24 OKTOBER 2019 DIVERSI TIDAK BERHASIL
12.	12/Pen.Div/2019/ PN Cbi jo 20/Pid.Sus Anak/2019/PN Cbi 21 NOVEMBER 2019	RAINAL AGUSTAP HARAHAP ALS UCOK BIN ASRIN HARAHAP	Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana	27 NOVEMBER 2019	21 NOVEMBER 2019 12/Pen.Div/2 019/PN Cbi	21 NOVEMBER 2019 DIVERSI TIDAK BERHASIL
13.	13/Pen.Div/2019/ PN Cbi 27 NOVEMBER 2019	TIRTA LASAH BIN RUSDI	Pasal 362 KUHPidana	27 NOVEMBER 2019	27 NOVEMBER 2019 13/Pen.Div/2 019/PN Cbi	27 NOVEMBER 2019
14.	14/Pen.Div/2019/ PN Cbi 19 DESEMBER 2019	MUHAMMAD AZZAM ALFARISSY BIN BACHTIAR	Pasal 76 C Jo.Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Subsidiar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012	23 OKTOBER 2019	19 DESEMBER 2019 14/Pen.Div/2 019/PN Cbi	12 DESEMBER 2019 DIVERSI BERHASIL



			tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana			
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk	Dikirim Ke PT/MA RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA RI
1	Perkara Pidana Banding	4	30	25	4	5
2	Perkara Pidana Kasasi	3	22	20	4	1
3	Perkara Pidana Peninjauan Kembali	1	1	2		

Untuk Perkara Pidana Yang Mengajukan **Grasi** yang diterima kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

- Belum putus s/d Des 2018 : 1 perkara
- Masuk tahun 2019 : 2 perkara
- Dikirim ke MA tahun 2019 : 2 perkara
- Putus tahun 2019 : 1 perkara
- Sisa tahun 2019 : perkara



2. Perkara Perdata

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2019 sebanyak 1.288 perkara, dan perkara yang diputus adalah sebanyak 1.075 perkara, dan 213 sisa perkara yang masih berjalan di akhir tahun 2019
- Dari 1.288 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.075 Perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2019 mencapai 83,46%.
- Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 1.075 Perkara Perdata yang telah diputus, 1.074 diantaranya telah berhasil minutasasi. Terdapat 192 perkara yang sudah putus pada akhir tahun 2018 dan diminutasasi pada tahun 2019 sehingga jumlah perkara yang berhasil diminutasasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah putus.

Tabel 5. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Diterima 2019	Dicabut 2019	Putus 2019	Minutasasi 2019	Belum Minutasasi		Sisa 2019 (masih berjalan)
							<14 hr	>14 hr	
1.	Perkara Perdata Gugatan	155	405	80	388	389	1	9	172
2.	Perkara Perdata Permohonan	37	691	74	687	685	1		41
	Total	192	1096	154	1075	1074	2	9	213

Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan.



Ditahun 2019, dari 248 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang berhasil damai baik dengan akta perdamaian sebanyak 2 perkara, tidak berhasil 201 perkara dan sampai 31 Desember 2019 masih ada 12 perkara yang masih dalam proses mediasi. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA ditahun 2019 realisasinya sebesar 0,9%.

**Tabel 6. Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019**

Tidak dapat dilaksanakan	Mediasi Berhasil	Tidak Berhasil	Belum ada Mediasi	Masih Berjalan
11	2	201	33	12

Adapun jenis jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2019 dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Gugatan sebanyak perkara yang terdiri dari:

- Tanah : 44 perkara
- Barang bukan tanah / perumahan : 2 perkara
- Perceraian : 136 perkara
- Harta perkawinan : 4 perkara
- Asuransi : - perkara
- Penyalahgunaan hak : - perkara
- Wanprestasi : 55 perkara
- Perbuatan melawan hukum : 148 perkara
- Ganti rugi : 6 perkara
- Pengangkata anak : perkara
- Lain lain : 10 perkara

b. Perkara Perdata Permohonan sebanyak perkara yang terdiri dari:

- Ganti nama : 59 perkara
- Pengangkatan anak : 8 perkara
- Wali pengampu : 3 perkara
- Perbaikan akta kelahiran : 401 perkara
- Akte kematian : 38 perkara
- Akte perkawinan : 13 perkara



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

- Perwalian dan ijin jual : 39 perkara
- Perwalian : 22 perkara
- Lain lain : 108 perkara

Untuk Perkara Perdata Yang Mengajukan Upaya Banding yang diterima kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong sebagai berikut :

Tabel 7. Data Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Banding	22	69	54	1	14
2	Perkara Perdata Kasasi	19	57	61	3	6
3	Perkara Perdata Peninjauan Kembali	5	10	12	1	1

E. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1. POSBAKUM

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut. Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini kemudian direspon oleh Mahkamah Agung RI dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke



pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum prosedural, baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Posbakum merupakan usaha Mahkamah Agung RI untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetap dapat beracara di Pengadilan. Didalam pos bantuan hukum ini akan disediakan Pengacara piket yang bertugas untuk memberikan layanan hukum berupa Konsultasi/Advis hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan tanpa biaya (gratis).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No 1 Tahun 2014 bahwa pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang melayani pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di pengadilan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, Konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bakum yang Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Cibinong dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.



Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menjalin kerjasama dengan dengan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Amalbi Cibinong dalam memberikan pelayanan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dengan diketuai oleh **TATY WAHYUNI OESMAN, SH** Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Amalbi Cibinong berkedudukan di Kav. Anugerah Rt. 005/ RW. 02 No. 30 Kp. Kalapa Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat

Sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 setiap pada awal tahun anggaran Pengadilan Negeri Cibinong melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum. Berikut adalah tahapan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA terhadap kinerja Petugas Pemberi Layanan Hukum:

1. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menunjuk Tim Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum dan menuangkannya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengumumkan kepada publik tentang pelaksanaan Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum;
3. Melakukan seleksi dan penilaian terhadap kelengkapan dokumen Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang masuk;

4. Mengumumkan Hasil Seleksi Dokumen Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum;
5. Memanggil dan melakukan wawancara terhadap Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lolos seleksi dokumen;
6. Mengumumkan hasil dari Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA kepada Publik;
7. Melakukan penandatanganan kerjasama pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dengan Yayasan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum YBH Amalbi Cibinong, maka selama 1 (satu) tahun yayasan tersebut memberikan informasi hukum, konsultasi/advis hukum, memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. (MoU terlampir); Berikut adalah foto dokumentasi dari kegiatan Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama Tahun Anggaran 2019.

Gambar 2. Foto Bersama YBH Amalbi Cibinong dengan Keluarga Besar PN Cibinong



Gambar 3. Foto Kegiatan YBH Amalbi Cibinong



2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

A. Pelayanan Hak Identitas Hukum di Kabupaten Cibinong

Pengadilan Negeri Cibinong dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan pelayanan terpadu hak identitas hukum kepada masyarakat di Kecamatan Cibinong. Tujuan dari dilaksanakannya sidang keliling ini adalah untuk memudahkan dan membuka akses kepada masyarakat tidak mampu dalam memenuhi hak-haknya sesuai ketentuan Undang-Undang. Dengan adanya kegiatan jemput bola ini diharapkan masyarakat lebih dekat dengan pengadilan dan Pemerintah Daerah (Pemda), dan sebaliknya Pengadilan juga dapat melihat langsung apa saja harapan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu.

Pada tanggal 29 November 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mendelegasikan pada hakim pengadilan Negeri Cibinong yaitu **Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.** untuk melaksanakan sidang keliling terpadu di Kecamatan Citeureup, didampingi oleh Panitera Muda Perdata **Tasdik, S.H., M.H.** dibantu oleh Panitera Penganti **Sukirno, S.ip, Dwi Djauhartono, S.H. dan Mien Setiadi, S.H.** Setelah kegiatan tersebut selesai, secara

simbolis Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil memberikan penetapan dan akte yang telah direnvoi dengan adanya perubahan.

Gambar 4. Pelayanan Hak Identitas di Kecamatan Citeureup



Gambar 5. Pelayanan Hak Identitas di Kecamatan Citeureup





**Tabel 8. Perkara Permohonan pada Sidang Keliling
Kecamatan Citeureup**

No	No Perkara	Atas Nama	Keterangan
1	606/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Jumadi	Kp. Rajur, Rt.003/Rw.008, Kel. Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
2	607/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Ida Rosida	Kp. Padurenan Rt.003/Rw.002, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong
3	608/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Yulia Waroka	Kp. Kambing Rt.001/Rw.008, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
4	609/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Martini	Kp. Babakan Rt.002/Rw.002, Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
5	610/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	H. Muhammad Nasir	Kp. Geber Baru Rt.002/Rw.004, Kel. Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
6	611/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Lilis Susilawati	Kp. Babakan Rt.004/Rw.001, Desa Batulayang, Kabupaten Bogor.
7	612/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	H. Muhammad Nasir	Kp. Geber Baru Rt.002/Rw.004, Kel. Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
8	613/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Acep Hudri	Kp. Kalong Tonggoh Rt.002/Rw.003, Kel. Kalong Ii, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.
9	614/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Acep Cahyadi	Kp. Duren Baru Rt.05/Rw.07, Desa Susukan, Kabupaten Bogor.
10	615/Pdt.P/2019/Pn.Cbi	Ringgie Galih Sugestie	Jl. Rambutan Iii Blok C.12/5, Rt.003/Rw.010, Kel. Karanggan, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor.



B. Pelayanan Sidang Tilang Ditempat

Salah satu program unggulan pada Pengadilan Negeri Cibinong adalah Sidang Tilang Ditempat yang merupakan kerjasama antara Pengadilan Negeri Cibinong dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Polres Bogor, dan Polisi Militer Kodim 0621 Cibinong. Sidang Perkara Tilang yang dilaksanakan langsung ditempat diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi para pengendara angkutan umum, mobil box, dan truk.

Proses sidang berlangsung didalam bis yang telah disediakan oleh pihak Dishub Kabupaten Bogor, dan denda tilang langsung diputus ditempat oleh Hakim yang bertugas dihadapan Panitera Pengganti dan Jaksa. Bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua yang terkena operasi sidang tilang ditempat, maka berkas perkara dilanjutkan proses sidangnya di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong.

Tabel 9. Sidang Tilang ditempat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kab Bogor TA 2019

NO	TANGGAL SIDANG	JUMLAH BERKAS	DENDA (Rp.)	
1	16/07/2019	16 Berkas	Rp.	1.095.000,
2	06/08/2019	11 Berkas		750.000,
3	07/08/2019	7 Berkas		408.000,
4	13/08/2019	30 Berkas		
5	11/09/2019	19 Berkas		550.000,
6	12/09/2019	17 Berkas		400.000,
7	24/09/2019	23 Berkas		1.070.000,
8	25/09/2019	12 Berkas		315.000,



3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Perkara Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

Surat Keterangan Tidak Mampu ("SKTM") yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan



secara cuma cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

- Surat Pengantar dari RT / RW.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Berikut adalah perkara prodeo yang diajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA :

Tabel 10. Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2019

NO	NO PERKARA	ATAS NAMA	KETERANGAN
1	60/Pdt.G/2019/PN.Cbi	Abud Permana	Prodeo Gugatan
2	252/Pdt.G/2019/PN.Cbi	Iyom Sumiati	Prodeo Permohonan
3	313/Pdt.G/2018/PN.Cbi	Moni Fakis	Prodeo Banding
4	270/PDt.G/2019/PN.Cbi	Maria Suzi Rahmawati	Prodeo Gugatan

BAB III



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

A. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Tahun

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Hakim	13 Orang	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4 Orang	
3.	Panitera Pengganti	22 Orang	
4.	Jurusita	2 Orang	
5.	Jurusita Pengganti	7 Orang	
	Total	48 Orang	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan:

1. SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong berjumlah 48 (empat puluh delapan) Orang, yang terdiri dari 13 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 22 Panitera pengganti, 2 Orang Jurusita dan 7 Orang Jurusita Pengganti
2. Jumlah Panitera Pengganti dan Jurusita tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Cibinong.

B. Sumber Daya Manusia Bidang Struktural Tahun

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini :



**Tabel 12. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial
Pengadilan Negeri Cibinong**

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	3 Orang	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
2.	Staf Administrasi	12 Orang	
	Total	15 Orang	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berjumlah 15 (lima belas) Orang, yang terdiri dari 3 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 12 Orang Staff.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Linda Cahyati sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Rio Grace Elisabeth Sitompul, Skom., Mkom., M.Si. sebagai Kepala Sub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Riyanto, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Adapun jabatan Sekretaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 masih belum ada pejabat definitive dikarenakan pejabat sebelumnya sudah menjalankan tugas pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.
3. Staff Administrasi berjumlah 12 (duabelas) orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum tidak ada staf, hanya 1 (satu) orang Jurusita Pengganti yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 2 (dua) orang staf, yaitu Kasir dan 1 (satu) orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP. Pada



bagian kepaniteraan Pidana terdapat 3 (tiga) orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.

- Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

C. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun

Tabel 13. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Cibinong

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	9	4		3	10				2	11	
Pejabat Struktural	1	2		3			1		1	1	
Pejabat Fungsional	1	3			4					4	
Panitera Pengganti	9	13		18	4		3	1	10	8	
Jurusita	2			2					2		
Jurusita Pengganti	6	1	1	6			3		4		
Staf Administrasi	6	6	2	10			5	2	3	2	
Total	34	29	3	42	18		12	3	22	26	

D. Kebutuhan/Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan sumber daya manusianya, harus mengajukannya ke Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Laporan Penetapan Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Perhitungan Analisis Beban Kerja beserta Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tanggal 11 Oktober 2019.

Tabel 14. Usulan Aparatur Sipil Negara pada PN Cibinong

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH YANG DIMINTA	KETERANGAN
1.	Staf Kepaniteraan Perdata	5 Orang	
2.	Staf Kepaniteraan Pidana	2 Orang	
3.	Staf Kepaniteraan Hukum	2 Orang	
4.	Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	2 Orang	
5.	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	4 Orang	
6.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	5 Orang	
	Total	20 Orang	

E. Promosi dan Mutasi Yang Terjadi Di Pengadilan Negeri Cibinong Selama Tahun

Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Data Hakim yang promosi dan mutasi ke Pengadilan lain selama Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN LAMA DI PN CIBINONG	JABATAN BARU
1.	Lendriaty Janis, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi
2.	Chandra Gautama, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
3.	Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Non Palu Pengadilan Tinggi Maluku Utara
4.	Raden Ayu Rizkiyati, S.H.	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

Tabel 16. Data Pegawai yang melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A selama Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU DI PN CIBINONG
1.	Nike Irawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bogor	Panitera Pengganti
2.	Dwi Djauhar Tono, S.H., M.H.	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Depok	Panitera Pengganti
3.	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.	-	CPNS/Pranata Komputer (Staf PTIP)
4.	Gabriela Yastika Putri, S.Psi.	-	CPNS/Analisis SDM Aparatur (Staf Kepegawaian & Ortala)
5.	Irene Isabella Nainggolan, S.H.	-	CPNS/Analisis Perkara Peradilan (Staf Kepaniteraan Pidana)

Tabel 17. Data Pegawai yang promosi dan mutasi ke Pengadilan lain selama Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN LAMA DI PN CIBINONG	JABATAN BARU
1.	Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2.	Harun Alatas Bhastian, S.T.	Staf Kepaniteraan Pidana	Staf di Pengadilan Negeri Bekasi
3.	Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4.	Syafrinaini, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



5.	Hardianto Wibowo, S.E., S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
6.	Yuswardi, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
7.	Maria Christine, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
8	Eli Suheli, S.H.	Juru Sita	Juru Sita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Terdapat 4 (empat) orang pegawai yang pensiun di tahun 2019, yaitu :

Tabel 18. Data Pegawai yang Pensiun Selama Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	TMT Pensiun	PENSIUN
1.	Margiyanti	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	01 02 2019	Pensiun Duda
2.	Tini Sumartini	Panitera Pengganti	01 03 2019	BUP
3.	Wilson Sinaga, S.H.	Juru Sita	01 07 2019	BUP
4.	Syamsul Bahri, S.H.	Juru Sita	01 08 2019	Pensiun Janda

F. Pendidikan dan Pelatihan Yang Diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Selama Tahun

Berikut ini data pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong dalam tahun 2019 sebagai berikut:



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

Tabel 19. Data Hakim dan Pegawai yang Mengikuti Pelatihan

NO	NAMA	DIKLAT	TEMPAT
1.	Dimas Lingga Wicaksana, S.H.	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan Tahun 2018 (23 Januari 2019)	Bogor
2.	Abdul Choir	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan Tahun 2018 (23 Januari 2019)	Bogor
3.	Agus Triana	Diklat Satpam (14 s.d. 21 Januari 2019)	Bogor
4.	Guni Tanzib	Diklat Satpam (18 s.d. 25 Maret 2019)	Bogor
5.	Tira Tirtona, S.H., M.Hum.	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Pemilu (17 s.d. 21 Februari 2019)	Bogor
6.	Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.	Pelatihan Tematik Tindak Pidana Pemilu (17 s.d. 21 Februari 2019)	Bogor
7.	Tasdik, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis dan Diseminasi Informasi Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Lintas Negara Bagi Pejabat Pengadilan di Wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta serta diskusi Implementasi Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata (8 Februari 2019)	Bandung
8.	Albert Bintang Partogi, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor



9.	Andre Budiman Panjaitan, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
10.	Artha Uly, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
11.	Denico Toschani, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
12.	Fabianca Cinthya S., S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
13.	Fridwan Fina, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
14.	Geri Caniggia, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
15.	Henry Ichfan Adityo, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
16.	M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
17.	Mario Reymond Pandey Silalahi, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
18.	Marshias Mereapul Ginting, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
19.	Muhammad Ilham Mirza, S.H.	Diklat II Calon Hakim (PPC) Terpadu (24 Maret s.d. 21 April 2019)	Bogor
20.	Endri Novian, S.E.	Diklat Keprotokolan Tingkat Manajerial Tahun 2019 (17 s.d. 22 Maret 2019)	Bogor



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

21.	Christoffer Oliverty, S.H.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 (17 s.d. 22 Maret 2019)	Bogor
22.	Lucy Ermawati, S.H.	Pelatihan Teknis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan II (25 s.d. 29 Maret 2019)	Jakarta
23.	Suci Handayani, A.Md.	Diklat Bendahara Penerimaan (3 s.d. 6 Maret 2019)	Bogor
24.	Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.	Training of Mentor II Program PPC Terpadu (3 s.d. 7 Maret 2019)	Bogor
25.	Chandra Gautama, S.H., M.H.	Training of Mentor II Program PPC Terpadu (3 s.d. 7 Maret 2019)	Bogor
26.	Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.	Training of Mentor II Program PPC Terpadu (3 s.d. 7 Maret 2019)	Bogor
27.	Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.	Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Aparat Penegak Hukum Angkatan II (27 s.d. 30 Juni 2019)	Batam
28.	Aris Kustiawan, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Panitera Pengganti Anak (10 s.d. 13 Juli 2019)	Bali
29.	Achmad Nurjaman, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Panitera Pengganti Anak (10 s.d. 13 Juli 2019)	Bali
30.	Minati Indriani, S.H.	Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Panitera Pengganti Anak (10 s.d. 13 Juli 2019)	Bali
31.	Albert Bintang Partogi, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor



32.	Andre Budiman Panjaitan, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
33.	Artha Uly, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
34.	Denico Toschani, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
35.	Fridwan Fina, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
36.	Geri Caniggia, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
37.	Henry Ichfan Adityo, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
38.	M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
39.	Mario Reymond Pandey Silalahi, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
40.	Marshias Mereapul Ginting, S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu (4 Agustus s.d. 15 September 2019)	Bogor
41.	Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.	Diklat Intelijen Keuangan (Dasar) Batch III "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Aparat Penegak Hukum" (29 s.d. 31 Juli 2019)	Depok
42.	Lucy Ermawati, S.H.	Training Of Mentor III Gelombang I Program PPC Terpadu (21 s.d. 24 Juli 2019)	Bogor



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

43.	Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.	Training Of Mentor III Gelombang I Program PPC Terpadu (21 s.d. 24 Juli 2019)	Bogor
44.	Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.	Training Of Mentor III Gelombang I Program PPC Terpadu (21 s.d. 24 Juli 2019)	Bogor
45.	Irfanudin, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.3.0 (11 s.d. 13 September 2019)	Bandung
46.	Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.3.0 (11 s.d. 13 September 2019)	Bandung
47.	Muhammad Faizal Nurdin, S.Kom.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.3.0 (11 s.d. 13 September 2019)	Bandung
48.	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.	Diklat Bendahara Pengeluaran (13 s.d. 18 Oktober 2019)	Bogor
49.	Abdul Choir	Bimbingan Teknis Tindak lanjut Revisi Penilaian Kembali BMN Tahun 2019 dan Pengelolaan Kekayaan Negara (17 s.d. 18 Oktober 2019)	Bogor
50.	Agung Devyanto, A.Md.	Bimbingan Teknis Tindak lanjut Revisi Penilaian Kembali BMN Tahun 2019 dan Pengelolaan Kekayaan Negara (17 s.d. 18 Oktober 2019)	Bogor
51.	Fabianca Cinthya S., S.H.	Diklat III Calon Hakim (PPC) Terpadu Gelombang III (4 November s.d. 14 Desember 2019)	Bogor
52.	Irene Isabella Nainggolan, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Gelombang I (4 s.d. 23 November 2019)	Jakarta



53.	Gabriela Yastika Putri, S.Psi.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Gelombang I (4 s.d. 23 November 2019)	Jakarta
54.	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Gelombang I (4 s.d. 23 November 2019)	Jakarta



BAB IV



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2019 dengan Pagu sebesar Rp. 11.018.884.000,

DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA 005.3.2.613520/2019 dengan PAGU sebesar Rp.477.960.000,

Namun selama Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan 5 (lima) kali revisi untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2019 dan 5 (lima) kali revisi DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.613520/2019.

**Tabel 20. DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Tahun Anggaran 2019**

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 31-12-2019	%	Sisa Anggaran 31-12-2019	%
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)	8.409.11.000	8.303.117.678	98.74	106.293.322	1.26
		Belanja Barang (52)	1.740.473.000	1.739.296.438	99.93	1.176.562	0.07
		Belanja Modal (53)	869.000.000	868.999.600	100	400	0
2	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)	477.960.000	475.134.520	99.41	2.825.480	0.59



Tabel 21. Revisi DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2019

NO	Revisi	Tanggal	Nilai (dalamRp.)	Keterangan
DIPA 01				
Nilai Awal			9.009.717.000,	
1	Revisi ke 1	29/05/2019	9.231.967.000,	Menambah anqqaran untuk langgan internet dan laptop hakim senilai Rp.89.250.000 , dan Rp.50.000.000,
2	Revisi ke 2	25/07/2019	9.257.667.000,	Untuk tambahan lanqqanan listrik sebesar 43.700.000
3	Revisi ke 3	19/08/2019	9.377.667.000,	Untuk tambahan sewa rumah dinas hakim sebesar 120.000.000
4	Revisi ke 4	30/09/2019	10.181.667.000,	Untuk tambahan dana hibah langsung sebesar 804.000.000
5	Revisi ke 5	05/11/2019	11.018.667.000,	Untuk tambahan belanja pegawai sebesar 437.429.000
DIPA 03				
Nilai Awal			477.960.000,	
1	Revisi ke 1	04/04/2019	477.960.000,	Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan
2	Revisi ke 2	27/06/2019	477.960.000,	Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan
3	Revisi ke 3	30/09/2019	477.960.000,	Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan serta perubahan POK.
4	Revisi ke 4	25/11//2019	477.960.000,	Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan serta perubahan POK.
5	Revisi ke 5	29/11/2019	477.960.000,	Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan serta perubahan POK.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menerima 2 (dua) Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor untuk :

1. Pada tanggal 30 April 2019 memperoleh Piagam Penghargaan Triwulan I sebagai Peringkat Terbaik Ketiga untuk Capaian IKPA Kategori Satker Pengelola Pagu s.d. 10 Milyar Rupiah;
2. Pada tanggal 08 Oktober 2019 memperoleh Piagam Penghargaan Triwulan III sebagai Peringkat Terbaik Ketiga untuk Capaian IKPA Kategori Satker Pengelola Pagu s.d. 10 Milyar Rupiah;

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong mulai dibangun tahun 1997 di atas tanah seluas. 7.315 M². Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Cibinong terdiri dari 2 lantai dengan Luas 3.037 M² senilai **Rp. 8.698.525.000,-**

Gambar 6. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 7. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 8. Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 9. Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 10. Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 11. Halaman Gedung Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 12. Area Merokok Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah :

- a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :
- 4 (empat) ruang sidang dewasa;
 - 1 (satu) ruang sidang anak;
 - 1 (satu) ruang teleconference korban/saksi anak;
 - 1 (satu) ruang tunggu ramah anak;
 - 2 (dua) ruang mediasi ;
 - 2 (dua) ruang kaukus;
 - 1 (satu) ruang tahanan Pria;
 - 1 (satu) ruang tahanan wanita;
 - 1 (satu) ruang Pelayanan PTSP dan Penjadwalan Sidang;
 - 1 (satu) ruang tunggu sidang;
 - 1 (satu) ruang tunggu Jaksa;
 - 1 (satu) ruang perpustakaan;
 - 1 (satu) ruang menyusui;



- 1 (satu) ruang kesekretariatan APM;
 - 1 (satu) ruang pos bantuan hukum;
 - 1 (satu) ruang payment point BTN.
- b. Ruang kerja, terdiri dari :
- 1 (satu) Ruang Kerja Ketua;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Wakil Ketua;
 - 4 (empat) Ruang Kerja Hakim;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Panitera;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Sekretaris;
 - 2 (dua) Ruang Kerja Panitera Pengganti;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Jurusita;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Sub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Sub Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Kepaniteraan Pidana;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Kepaniteraan Perdata;
 - 1 (satu) Ruang Kerja Kepaniteraan Hukum.
 - 4 (empat) ruang arsip yang terdiri dari 2 ruang arsip pidana dan 2 ruang arsip perdata.

Gambar 13. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 14. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 15. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 16. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



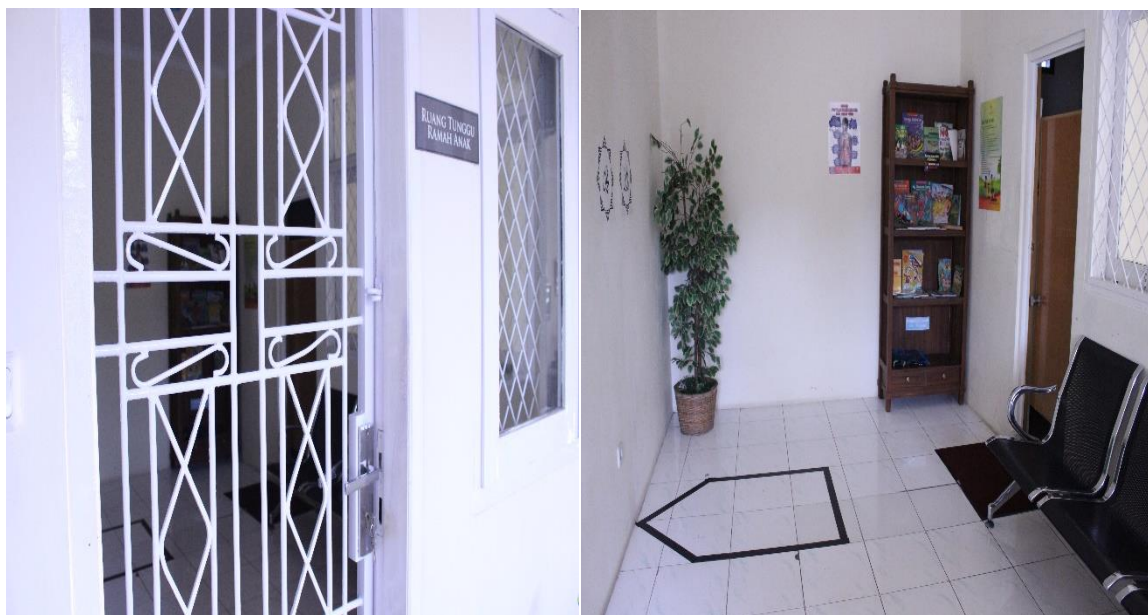
Gambar 17. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 18. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 19. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 20. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 21. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 22. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 23. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



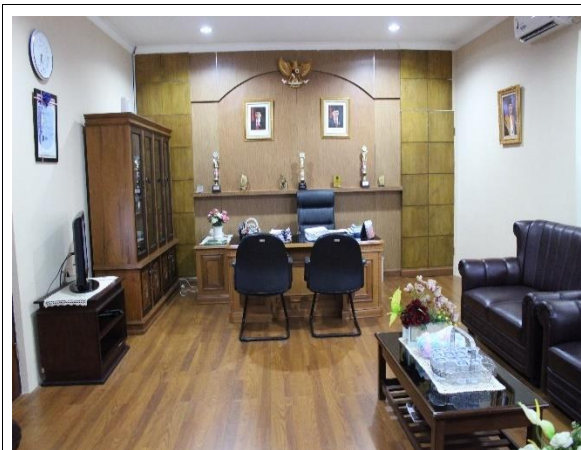
Gambar 24. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 25. Fasilitas pada Pengadilan Negeri Cibinong



Gambar 26. Ruang Kerja Ketua





Gambar 27. Ruang Kerja Wakil Ketua



Gambar 28. Ruang Kerja Wakil Ketua



**2. BIDANG TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN**

- a. Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang cukup berarti.
- b. Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau Panitera/Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum.
- c. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2019 adalah sebesar 7622 buah surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 7181 buah surat.
- d. Buku buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku buku ekspedisinya tersimpan rapi di sub bagian umum.

3. BIDANG PERPUSTAKAAN

- a. Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN
- b. Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, Kantong buku dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan
- c. Pemeliharaan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku dengan vacuum cleaner sudah dilakukan.
- d. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2019 sebesar 2.735 buku.
- e. Buku Induk Perpustakaan, Buku Peminjaman, Buku Tamu, Buku Penerimaan sudah dilaksanakan.
- f. Katalog Perpustakaan terus dilengkapi

4. BIDANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)

- a. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen akutansi Barang Milik Negara) sudah berjalan baik dengan operator SIMAK BMN adalah Abdul Cho r dibantu dengan Agung Devyanto,A.Md.
- b. Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan Sudah dikirim sesuai waktu yang ditetapkan.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

- c. Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Cibinong sebesar per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 91.053.919.292,**
- d. Tanah senilai **Rp. 82.437.445.000,**

Tabel 22. Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2019

No	Keterangan Tanah	Luas	Nilai Perolehan / Taksiran (Rp)	Alamat	Bukti Kepemilikan
1	Tanah Gedung Kantor	5.315 m2	531.500.000	Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 42 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 11/09/2009
2	Tanah Rumah Dinas	995 M2	308.450.000	JL. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Boqor	Sertifikat Hak Pakai No. 2 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25/10/1997)
3	Tanah Rumah Dinas	2.393 m2	1.914.400.000,	JL. Sirojul Munir/Kp. Cikemponq Rt.002/Rw.09, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 6298 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 09/6/2014)
4	Tanah Kantor PN. Cibinong Hibah dari Pemkab. Bogor	2.000 m2	2.843.910.000,	Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 48 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 27/09/2013



e. **Rumah Dinas 5 Unit** terdiri dari :

**Tabel 23. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cibinong
Tahun Anggaran 2019**

No	Type Rumah Dinas	Luas Tanah	Luas Bangunan	Alamat	Keterangan Penghuni
1	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	70 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong/Rusak
2	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	70 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Thantowi Rais, Juru Sita Pengganti
3	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	70 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong/Rusak
4	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	200 M2	50 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Kosong/Rusak
5	Rumah dinas Golongan I Type C permanen	195 M2	50 M2	Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Dimas Lingga W, SH, Staf Umum dan Keuangan

- g. **Mobil Dinas 7 Unit** (BPKB ada di Brankas Bendahara Pengeluaran) terdiri 5 unit sebagai BMN milik kantor Pengadilan Negeri Cibinong, 2 Unit BMN milik Pemkab Bogor (pinjam pakai). Berikut keterangan untuk ke 7 unit mobil dinas tersebut :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

Tabel 24.

Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

No	Merk/Type Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nilai Perolehan	Keterangan/Pengguna
1	Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2008	2008	F 1342 F	Rp.160.868.328,	Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.
2	Mobil Toyota Kijang KF 83 LSX Tahun 2003	2003	F 1158 F	Rp.118.726.000,	Tasdik, S.H., M.H.
3	Mobil Toyota Kijang KF 83 LGX Tahun 2004	2004	F 3 F	Rp.110.210.000,	Linda Cahyati
4	Mobil Sedan Proton Tahun 2010	2010	F 1224 G	Rp.152.274.000,	Dimas Lingga Wicaksana, S.H.
5	Mobil Toyota Avanza Tahun 2011	2011	F 1533 F	Rp.168.500.000,	Rio Grace E Sitompul, S.Kom., M.Kom
6	Mobil Toyota Fortuner	2014	F 1219 G		Irfanudin, S.H., M.H.
7	Mobil Mitsubishi Outlander	2012	F 1690 F		Darius Naftali, S.H., M.H.

h. Motor Dinas 7 Unit

Tabel 25.

Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

No	Merk/Type Kendaraan	Tahun	Nomor Polisi	Keterangan/Pengguna
1	Honda Supra 125 D	2005	F 4287 F	Thantowi Rais
2	Mega Pro	2006	F 4636 F	Tasdik, S.H., M.H.
3	Mega Pro	2006	F 4695 F	M. irfan nurdin, S.kom.
4	Honda Supra 125	2007	F 4474 F	Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.
5	Honda Supra 125	2008	F 4697 F	Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom., M.Kom.
6	Honda Supra 125	2008	F 4698 F	Irfanudin, S.H., M.H.
7	Honda Supra 125 FI	2011	F 3088 G	Riyanto, S.H., M.H.

- i. AC Split : 47 Unit
- j. Komputer : 49 Unit
- k. Laptop : 7 Unit
- l. Note Book : 1 Unit
- m. Printer : 36 Unit
- n. Handicam : 2 Unit (1 Unit Rusak)



o. Infocus	: 1	Unit (Rusak)
p. Mesin Genset	: 2	1 Unit (Rusak Ringan)
q. PABX	: 1	Unit
r. Handy Talky	: 6	Unit
s. Mesin Absen	: 1	Unit (Rusak Ringan)
t. Tabung Pemadam Api	: 7	Unit (Perlu Isi Ulang)
u. Mesin Fax	: 2	Unit
v. Mesin Ketik	: 4	Unit (Rusak)
w. Lemari Besi	: 24	Unit (5 Rusak)
x. Filling Kabinet	: 18	Unit (5 Rusak)
y. Meja Kerja	: 141	Unit
z. Kursi Besi Metal	: 233	Unit
aa. Kursi Roda	: 1	Unit
bb. Vacuum Cleaner	: 1	Unit (Rusak)
cc. Sound Sistem	: 3	Unit (1 Unit Rusak)
dd. Server	: 1	Unit
ee. Jaringan LAN	: 1	Paket
ff. CCTV	: 32	Unit
gg. DVR CCTV	: 1	Unit

Dan barang barang lain yang tidak masuk dalam Simak BMN

5. BIDANG KEAMANAN

- a. Pengamanan Kantor dilakukan oleh 4 (empat) Orang Petugas Pamfik (Honorar). Pembagian kerja dilakukan dalam 2 (dua) shift. Untuk pengamanan kantor pada shift pertama dijaga oleh 3 (tiga) orang Pamfik sedangkan untuk shift ke-2 yaitu pada malam hari, pengamanan kantor dilakukan oleh 1 (satu) orang Pamfik dibantu dengan 1 (satu) orang honorar ruangan. Jadwal pengamanan kantor sudah dibuat oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan yaitu secara bergiliran Pamfik mendapat libur (off) selama 1 (satu) hari setelah bertugas selama 24 jam.

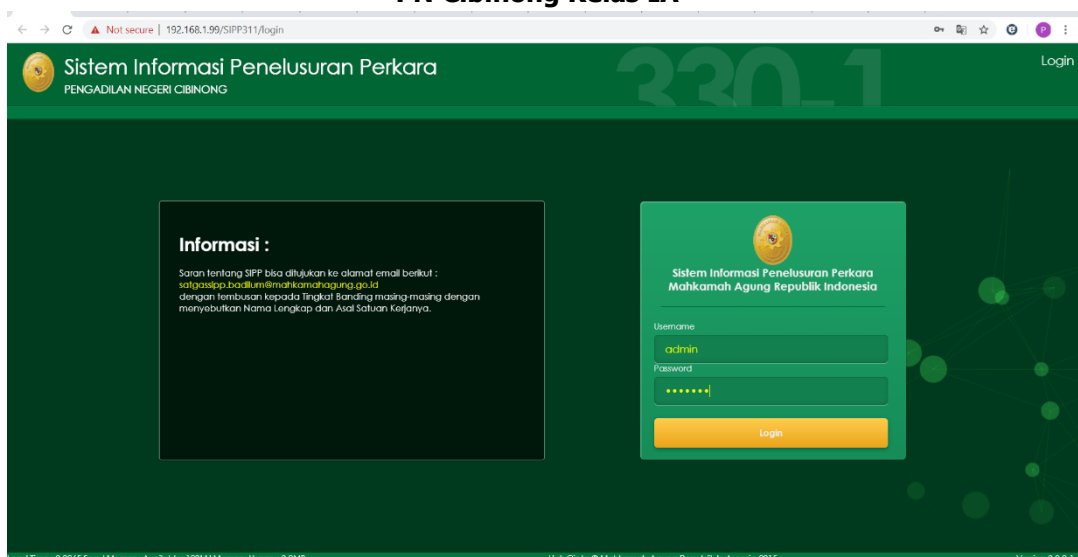
- b. Buku Laporan PAMFIK diisi setiap hari yaitu ketika petugas pengamanan berganti shift. Buku laporan dibaca dan diparaf oleh petugas yang telah ditunjuk dan disahkan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

1. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Cibinong

Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara atau SIPP adalah aplikasi penyedia informasi kepada masyarakat umum atau para pihak mengenai perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara. Hingga saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Subang. Aplikasi SIPP yang terpasang pada Pengadilan Negeri Cibinong selalu menyesuaikan dengan versi yang ter *install*. Pada saat ini versi terbaru yang sudah ter-*install* yaitu SIPP versi 3.3.0-1

**Gambar 29. Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PN Cibinong Kelas IA**



Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sudah ter-*install* di setiap PC ataupun Laptop masing-masing Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Petugas admin tiap kepaniteraan, admin dan staff PTIP. Selain itu juga kepatuhan dalam penginputan perkara pada SIPP selalu di pantau

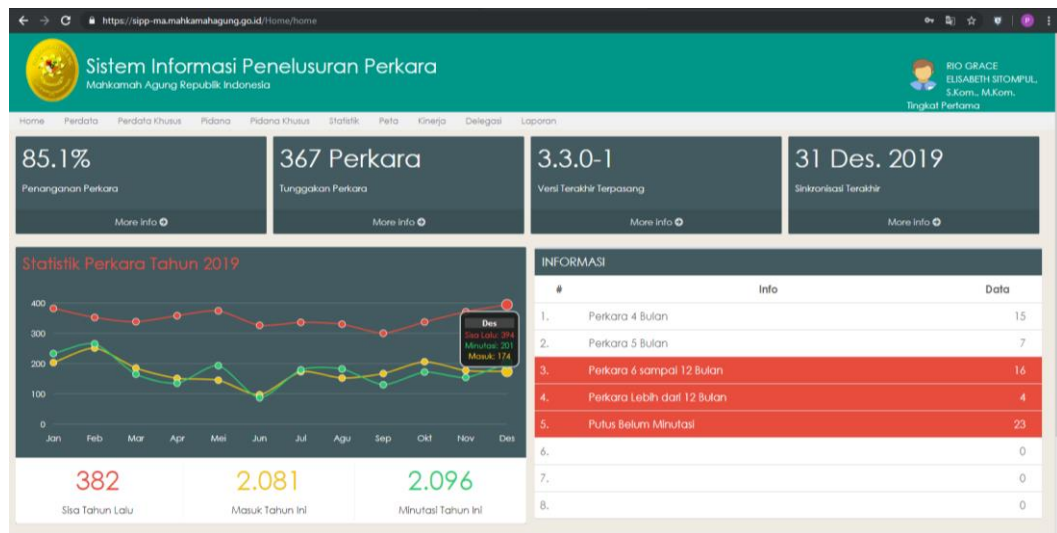
oleh pimpinan dan unsur pimpinan melalui Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi MIS yang sudah ter *install* pada PN Cibinong adalah mengikuti versi ter *update* yaitu versi 1.3

Gambar 30. Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) PN Cibinong Kelas IA

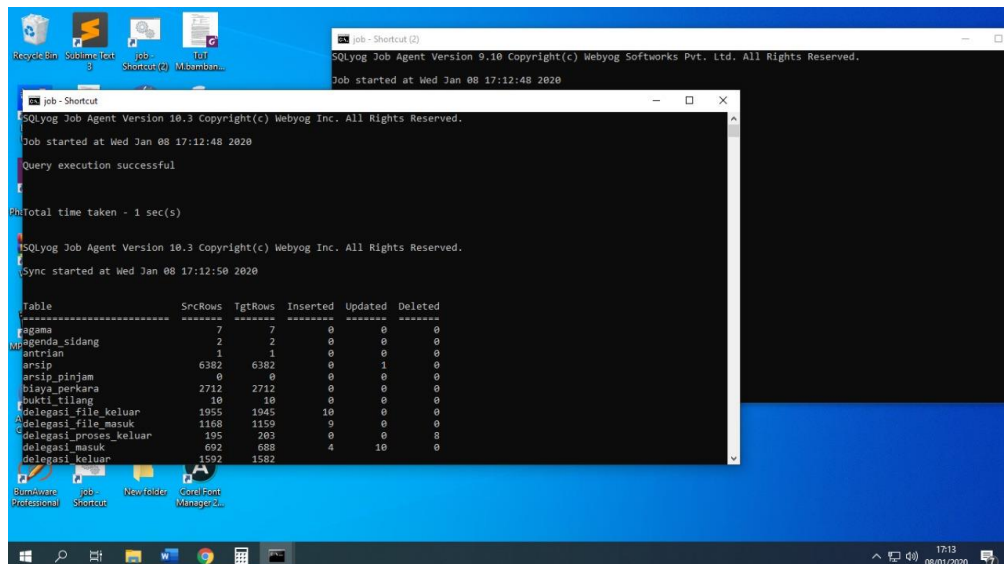


Proses sinkronisasi data ke Database Mahkamah Agung RI dilakukan oleh staf PTIP yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan Surat Keputusan (SK). Sinkronisasi data dilakukan 3 (tiga) kali dalam setiap hari dengan waktu sinkronisasi yang dipilih dan dianggap tepat oleh Tim PTIP. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan data yang ada pada Database Lokal pada Pengadilan Negeri Cibinong sama dengan Database yang ada pada SIPP Mahkamah Agung RI sehingga publik dapat mengakses data perkara ter-*update*

Gambar 31. Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cibinong Kelas IA Pada Mahkamah Agung RI



Gambar 32. Proses Sinkronisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Cibinong Kelas IA



2. Implementasi Era Terang pada Pengadilan Negeri Cibinong

ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri Cibinong yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri Cibinong. Aplikasi Surat Layanan Elektronik Ini Dibuat Untuk Tujuan Sebagai Berikut :

- Mempermudah Masyarakat dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan.

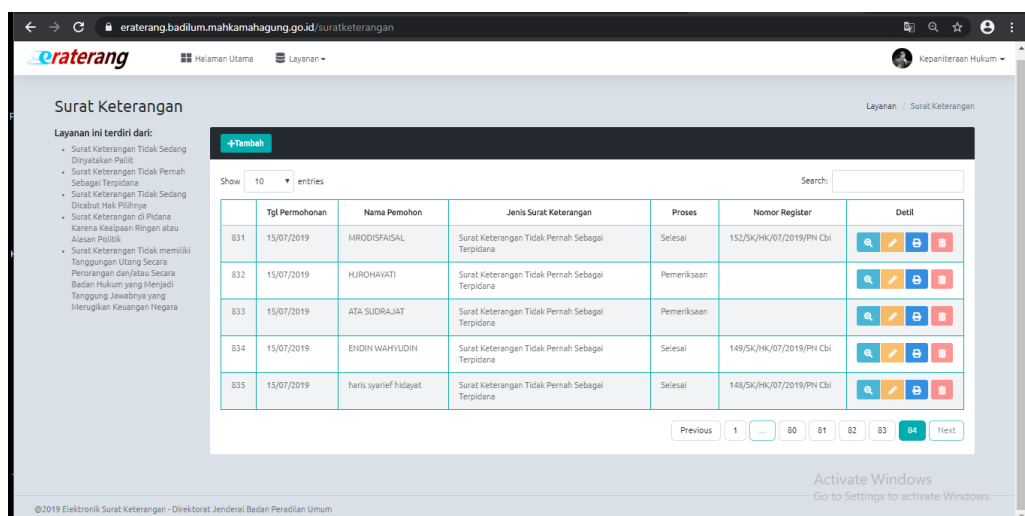
- Bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satker.

Adapun Surat Keterangan Yang Dapat Dibuat Di Aplikasi Eraterang Ini Sebagai Berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Adapun jumlah surat keterangan yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 835 surat dan terlihat pada gambar tangkap layer dibawah ini.

Gambar 33. Tangkap Layar Jumlah Surat Keterangan yang masuk pada Aplikasi Era Terang PN Cibinong Kelas IA



The screenshot shows the 'Surat Keterangan' (Letter of Explanation) section of the Eraterang application. It displays a table with 5 entries, each representing a letter of explanation submitted by a user. The table columns are: No, Tgl Permohonan, Nama Pemohon, Jenis Surat Keterangan, Proses, Nomor Register, and Detil. The entries are numbered 831 to 835, all dated 15/07/2019. The types of letters are 'Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana' (Letter of Explanation of No Previous Conviction) and 'Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana' (Letter of Explanation of No Previous Conviction). The process status is 'Selesai' (Completed) for all entries. The register numbers are 152/SK/HK/07/2019/PN Cbi, 149/SK/HK/07/2019/PN Cbi, and 148/SK/HK/07/2019/PN Cbi.

No	Tgl Permohonan	Nama Pemohon	Jenis Surat Keterangan	Proses	Nomor Register	Detil
831	15/07/2019	MIRODISAISAL	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	152/SK/HK/07/2019/PN Cbi	  
832	15/07/2019	HUROHAYATI	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Pemeriksaan		  
833	15/07/2019	ATA SUDRAJAT	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Pemeriksaan		  
834	15/07/2019	ENDIN WAHYUDIN	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	149/SK/HK/07/2019/PN Cbi	  
835	15/07/2019	haris syarif hidayat	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Selesai	148/SK/HK/07/2019/PN Cbi	  



3. Implementasi E Court pada Pengadilan Negeri Cibinong

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.

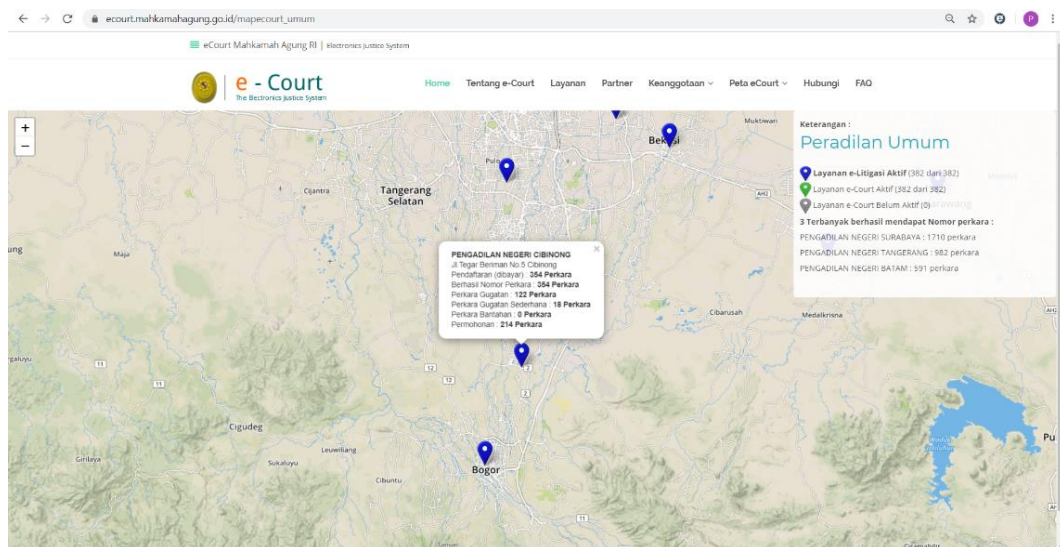
Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, terdapat 354 perkara perdata baik Gugatan maupun Permohonan yang sudah terdaftar melalui aplikasi e court baik melalui e filling, e payment dan e summons, dengan rincian sebagai berikut :

▪ Perkara Gugatan	122	Perkara
▪ Perkara Gugatan Sederhana	18	Perkara
▪ Perkara Bantahan	0	Perkara
▪ Perkara Permohonan	214	Perkara

Berikut adalah gambar PN Cibinong pada peta e court Mahkamah Agung RI

Gambar 34. Tangkap Layar Peta Aplikasi Era Terang PN Cibinong Kelas IA



BAB V



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi penjaminan mutu tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten guna mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas Sumber Daya Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan tingkat pertama, dan sekaligus merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA perlu memiliki sistem



manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Cibinong.

Tabel berikut menggambarkan pencapaian Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam hal penjaminan mutu :

Tabel 26. Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Cibinong

NO	TANGGAL PEMBERIAN SERTIFIKAT	SERTIFIKASI
1	22 Desember 2015	Sertifikasi ISO 9001:2008
2	14 September 2016	Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum MA RI dengan predikat "A" Excellence
3	24 Juli 2017	Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum MA RI dengan predikat "A" Excellence

Hal ini bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk bagi Pengadilan Negeri Cibinong agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Cibinong : "SIMPATIK", yakni Sinergi Integritas Mandiri Profesional Akuntabel Transparan Inovatif dan Kompeten. Maka dengan pencapaian yang telah diperoleh tersebut Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA akan semakin berusaha untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat pencari keadilan. (Dokumen Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu terlampir)



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam Buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan pengadilan yang prima yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, efektif, efisien dan ekonomis sebagaimana menjadi motto Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi KKN di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Nomor : W11-U20/128/KPN.Cbi/OT.00/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk selanjutnya disebut SK Ketua Pengadilan, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut, meliputi:

1) Kepaniteraan Pidana

- ✓ Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- ✓ Pendaftaran permohonan praperadilan;
- ✓ Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- ✓ Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan;



- ✓ Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
- ✓ Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelalangan barang bukti;
- ✓ Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
- ✓ Penerimaan permohonan pembantaran;
- ✓ Penerimaan permohonan izin besuk;
- ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

2) Kepaniteraan Perdata

- ✓ Pendaftaran perkara gugutan biasa;
- ✓ Pendaftaran perkara gugutan sederhana;
- ✓ Pendaftaran verset atas putusan verstek;
- ✓ Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- ✓ Pendaftaran perkara permohonan;
- ✓ Pendaftaran penerimaan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✓ Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- ✓ Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
- ✓ Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- ✓ Pendaftaran permohonan eksekusi;
- ✓ Pendaftaran permohonan konsinyasi;
- ✓ Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
- ✓ Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi;
- ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.



3) Kepaniteraan Hukum

- ✓ Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
- ✓ Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
- ✓ Permohonan pendaftaran penolakan waris;
- ✓ Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
- ✓ Permohonan melaksanakan penelitian dan riset ;
- ✓ Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- ✓ Permohonan pendaftaran surat kuasa;
- ✓ Permohonan pendaftaran legalisasi dan kelahiran;
- ✓ Permohonan legalisasi surat;
- ✓ Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
- ✓ Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
- ✓ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.

4) Umum dan Keuangan

- ✓ Penerimaan surat masuk;
- ✓ Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.

Berikut foto foto dokumentasi dari pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA :

Gambar 35. *Lauching* Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Cibinong Kelas IA



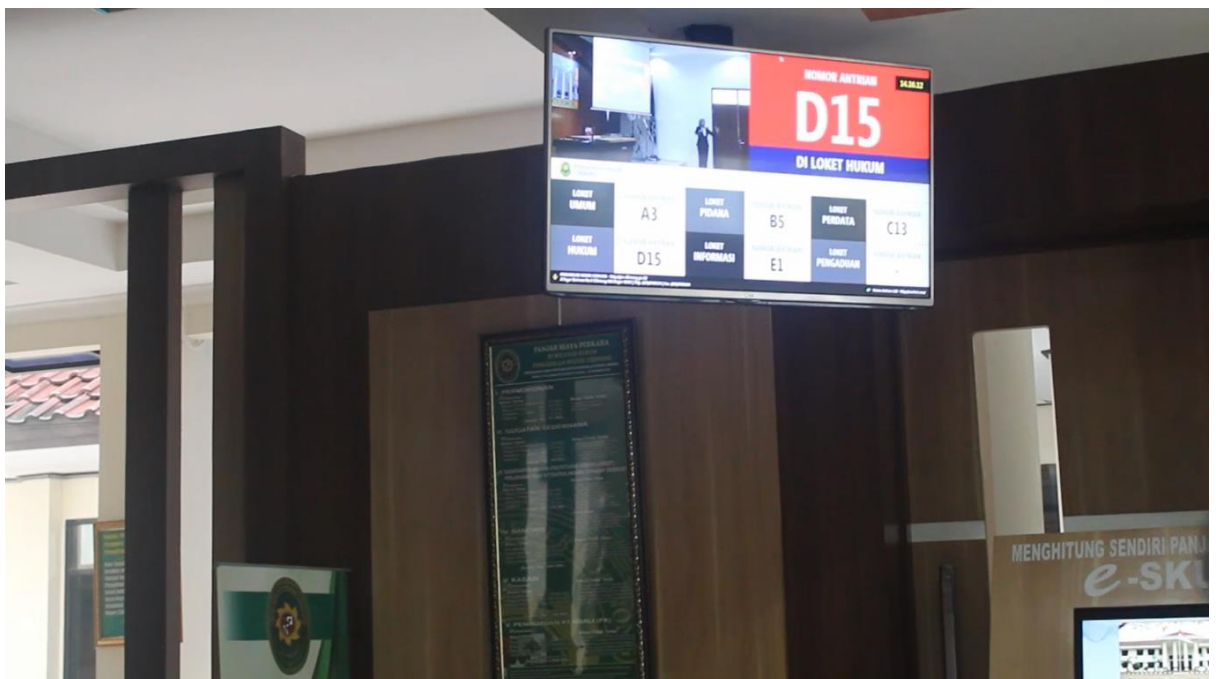
Gambar 36. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



Gambar 37. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

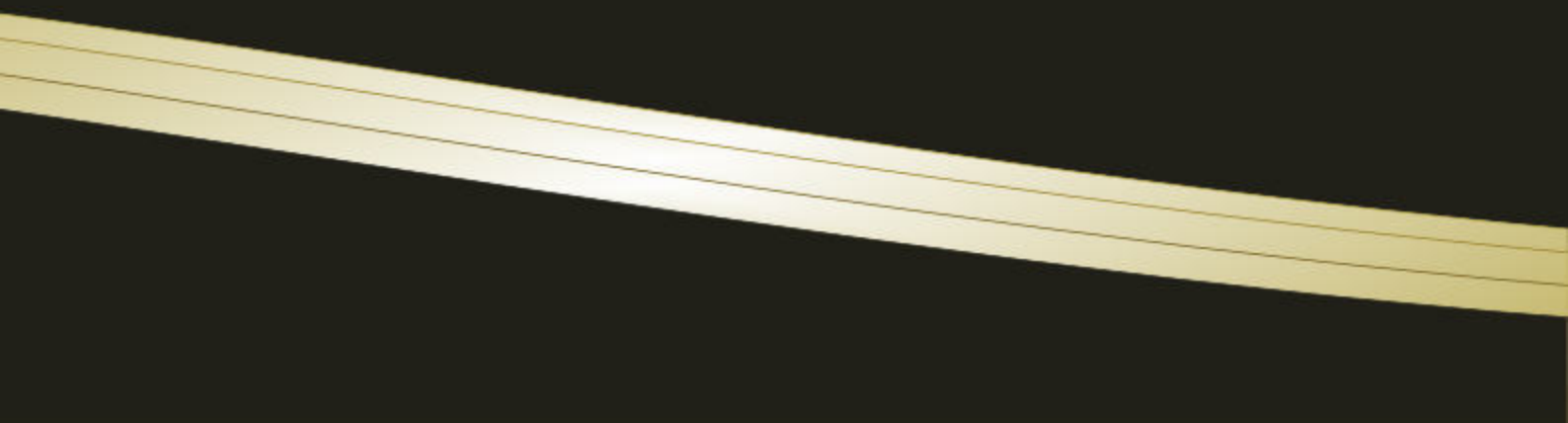


Gambar 38. Sistem Antrian PTSP PN Cibinong Kelas IA





BAB VI





BAB VI

PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:

NO	NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG	BIDANG PENGAWASAN	URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3	4
2. 3.	INDRA MEINANTHA VIDI, S.H. NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.	Kepaniteraan Perdata	➤ Tertib administrasi keuangan perkara pihak ke-3 ➤ Tertib administrasi perkara perdata gugatan, permohonan dan perlawanan (seluruh register perkara perdata) ➤ Tertib administrasi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, baik gugatan maupun permohonan ➤ Tertib administrasi eksekusi putusan ➤ Pengawas mediasi ➤ Tertib administrasi minutas putusan dan penyerahan salinan putusan ➤ Pengawasan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Kepaniteraan Perdata
4.	BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.	a) Kepaniteraan Hukum b) Kehumasan	➤ Tertib administrasi pendaftaran surat kuasa, surat keterangan tidak dipidana, direktori putusan, pencatatan badan hukum, legalisasi waris, aplikasi SIWAS, dan tugas-tugas lain yang menjadi wewenang Kepaniteraan Hukum ➤ Tertib administrasi kehumasan
5	FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.	a) Kepaniteraan Hukum b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	➤ Tertib administrasi arsip perkara ➤ Pengawasan pelaksanaan layanan Posbakum

II BIDANG KESEKRETARIATAN			
6. 7.	TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.	Sub Bagian Umum dan Keuangan	➤ Tertib administrasi pengelolaan keuangan ➤ Kebersihan/kerapihan seluruh kantor termasuk tertib administrasi surat-surat masuk/keluar ➤ Inventaris barang milik Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A/inventaris milik Negara ➤ Pengawas kebersihan kantor ➤ Pengawas Honorer
8. 9.	NUSI, S.H., M.H. LIENA, S.H., M.Hum.	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	➤ Tertib administrasi kepegawaian
10.	ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H.	a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan b) Pengawas Panitera Pengganti c) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) d) Pembangunan Zona Integritas (ZI)	➤ Tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan ➤ Pengawasan dalam hal kepatuhan penginputan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ➤ Pengawasan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ➤ Pengawasan terhadap pelaksanaan Zona Integritas (ZI)



1. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - Monitoring dan Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Cibinong
 - Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan
2. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti dan Honorer untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
4. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera/Sekretaris.
5. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

A. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA baik dengan



pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretaratan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.



BAB VII



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Pengadilan Negeri Cibinong berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi pada Pengadilan.
 - a. Penyajian informasi yang menggunakan medium website sistem informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang selalu *update* dengan rilis versi terbaru dari Mahkamah Agung RI.
 - b. Monitoring Implementasi SIPP yang sudah di *install* disetiap laptop/komputer unsur pimpinan dan seluruh unsur yang terkait dengan SIPP sehingga memudahkan pemantauan pengisian SIPP.
 - c. E Court sudah disosialisasikan kepada para Advokat yang tergabung pada PERADI dan KAI dan juga sudah diterapkan pada Pengadilan Negeri Cibinong. Dan pada tanggal 31 Desember tercatat jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Cibinong melalui aplikasi E Court sebanyak 335 perkara.
3. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan menjadi unggulan yaitu:



- Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website : www.pn-cibinong.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Cibinong .
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Cibinong yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak *akuntabel*. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Cibinong dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.
 - Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja Informasi dan Meja Pengaduan.
 - Program “One Day Service” yaitu pelayanan satu hari sidang keliling terpadu dalam hal pelayanan Hak Identitas Hukum bagi Masyarakat tidak mampu berupa perbaikan akte kelahiran.
 - Sistem “Nomor Antrian Sidang” untuk persidangan perkara pelanggaran lalulintas.
 - Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan dan Penyidik telah terlaksana 100%.
4. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Cibinong telah: menyelesaikan perkara sebagai berikut:
- a. Perkara Pidana :
- Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2019 sebanyak 67.238 perkara, yang terdiri dari 149 perkara sisa tahun 2018 dan 67.089 perkara baru Tahun 2019.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

- Dari 67.238 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 67.109 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2019 mencapai 99,80%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah berhasil menyelesaikan 771 Perkara dari 898 yang ditangani atau mencapai 85,85%. Terdapat 127 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2019.
- Untuk program tunggakan minutasasi, dari 67.111 Perkara Pidana yang telah diputus, 66.959 perkara telah berhasil minutasasi (99,77%).
- Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 yang masih berjalan sampai akhir tahun 2019 sebanyak 127 Perkara.

b. Perkara Perdata :

- Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2019 sebanyak 1.288 perkara, dan perkara yang diputus adalah sebanyak 1.075 perkara, dan 213 sisa perkara yang masih berjalan di akhir tahun 2019.
- Dari 1.288 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.075 Perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara perdata Tahun 2019 mencapai 83,46%.
- Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 1.075 Perkara Perdata yang telah diputus, 1.074 diantaranya telah berhasil minutasasi. Terdapat 192 perkara yang sudah putus pada akhir tahun 2018 dan diminutasasi pada tahun 2019 sehingga jumlah perkara yang berhasil diminutasasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah putus.

5. Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua, Wakil Ketua, Panitera atau Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar dipusatkan disimpan di bagian Umum. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2019 adalah sebesar 7622 buah surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 7181 buah surat.



6. Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN. Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, Kantong buku dan diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan. Pemeliharaan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku dengan *vacuum cleaner* sudah dilakukan. Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2019 besar 2.735 buku.
7. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen akutansi Barang Milik Negera) sudah berjalan baik dan Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan Sudah dikirim sesuai waktu yang ditetapkan.
8. Pengamanan Kantor dilakukan oleh 4 (empat) Orang Petugas Pamfik (Honorar). Pembagian kerja dilakukan dalam 2 (dua) shift. Untuk pengamanan kantor pada shift pertama dijaga oleh 3 (tiga) orang Pamfik sedangkan untuk shift ke-2 yaitu pada malam hari, pengamanan kantor dilakukan oleh 1 (satu) orang Pamfik dibantu dengan 1 (satu) orang honorar ruangan.

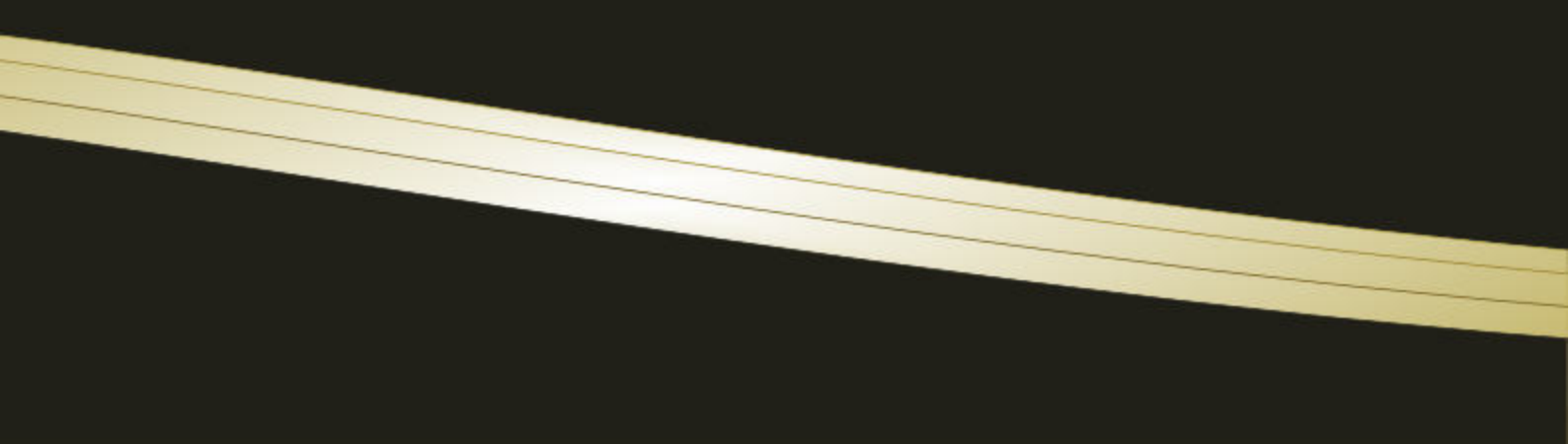


B. REKOMENDASI

1. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 14 Orang dengan rincian 2 Orang Pengelola IT, 4 Orang Operator komputer IT, 2 orang akuntan (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 6 Orang staff administrasi.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Agar para penanggung jawab unit kerja, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai bidangnya dan berpedoman pada program kerja.
4. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja.
5. Penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi.
6. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN



**PERMINTAAN DATA
PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN
2019**



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong - Kab. Bogor 16915
Telp. (021) 87905153 - 87905154, Fax. 87905153
Website : www.pn-cibinong.go.id e-mail : info.pncibinong@gmail.com

Nomor : W11-U20/6997/OT.01.1/XII/2019 Cibinong, 18 Desember 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permintaan Data untuk Pengisian**
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2019

Kepada Yth.

1. Pejabat Struktural

2. Pejabat Fungsional

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Di –

CIBINONG

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, maka dengan hormat kami meminta para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian dapat memberikan data-data yang kami butuhkan dengan mengisi blanko yang kami sediakan (terlampir).

Data-data tersebut harap disampaikan berupa *softcopy* kepada **Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) paling lambat tanggal 02 Januari 2020.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Plt. S E K R E T A R I S

Rio Grace E. Sitompul, SKom., M.Kom., MSi.
NIP. 19760712 200912 2 001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Laporan;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Laporan;
3. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Arsip.

FORM ISIAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2019

1. Kepaniteraan Pidana

A. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa 2018	Diteri ma 2019	Putus 2019	Minutasi 2019	Minutasi		Sisa 201 9
						< 14 hr	> 14 hr	
A.	Perkara Pidana							
	- Biasa/Khusus (diluar perkara anak)							
	- Perkara Anak							
	- Singkat							
	- Lalulintas							
	- Tindak Pidana Ringan							
	- Pra Peradilan							
	Total							

B. Perkara Pidana dengan Korban Anak Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Korban
1.	Asusila		
2.	Penganiayaan		
3.	Pengeroyokan		
4.	Perdagangan Anak		
5.	Penelantaran Anak		
6.	Eksplorasi Anak		
7.	Pembunuhan		
8.	Kekerasan terhadap Anak		
	Jumlah		

C. Putusan Perkara Pidana Anak (Anak sebagai Pelaku) Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Pelaku
1.	Pidana Penjara		
2.	Pelatihan Kerja di Panti Rehabilitasi		
3.	Dikembalikan kepada Orang Tua		
	Jumlah		

D. Perkara Pidana Anak yang Mengajukan Diversi Tahun 2019

No	Nomor Dan Tanggal Surat	Nama Anak	Pasal	Tanggal Kesepa katan	Tanggal Dan Nomor Penetapan	Tanggal Dan Pelaksanaan Isi Diversi
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7.						
8.						

9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2017	Masuk	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Pidana Banding					
2	Perkara Pidana Kasasi					
3	Perkara Pidana Peninjauan Kembali					

F. Perkara Pidana Yang Mengajukan **Grasi** yang diterima kepaniteraan Pidana:

Belum putus s/d Des 2018	: perkara
Masuk tahun 2019	: perkara
Dikirim ke MA tahun 2019	: perkara
Putus tahun 2019	: perkara
Sisa tahun 2019	: perkara

G. Perkara Perdata Yang Mengajukan Upaya Banding :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Banding					
2	Perkara Perdata Kasasi					
3	Perkara Perdata Peninjauan Kembali					

- Perbuatan melawan hukum : perkara
- Ganti rugi : perkara
- Pengangkata anak : perkara
- Lain-lain : perkara

b. Perkara Perdata Permohonan :

- Ganti nama : perkara
- Pengangkatan anak : perkara
- Wali pengampu : perkara
- Perbaikan akta kelahiran : perkara
- Akte kematian : perkara
- Akte perkawinan : perkara
- Perwalian dan ijin jual : perkara
- Perwalian : perkara
- Lain-lain : perkara

D. Perkara Perdata Yang Mengajukan Upaya Banding

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk Tahun 2019	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Banding					
2	Perkara Perdata Kasasi					
3	Perkara Perdata Peninjauan Kembali					

E. Keuangan Perkara Perdata Per 31 Desember 2019

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Sisa Awal	Rp	
2	Penerimaan Bulan Desember	Rp	
3	Materai	-	Rp
4	Leges	-	Rp
5	Sita Eksekusi	-	Rp
6	Iklan	-	Rp
7	Biaya Lelang	-	Rp
8	Saksi	-	Rp
9	Keamanan	-	Rp
10	Lain-lain	-	Rp

SALDO	-	Rp
J U M L A H	Rp	Rp

3. Kepaniteraan Hukum

A. Permohonan Legalisasi Badan Hukum Yang Diterima Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

No.	Jenis Permohonan yang diterima	Jumlah Permohonan yang diterima
1.	Legalisasi Badan Hukum	
	- Legalisasi CV Baru	Berkas
	- Legalisasi PD	Berkas
	- Legalisasi LSM	Berkas
	- Pembubaran CV	Berkas
	- Perubahan CV	Berkas
	Total	Berkas
2.	Surat Ijin Kuasa Insidentil	Surat
3.	Surat Keterangan tidak pernah dipidana dan tidak berperkara	Surat
4.	Surat Kuasa Pidana	Surat
5.	Surat Kuasa Perdata	Surat

B. Jumlah Berkas Perkara Yang Diterima Bagian Arsip Kepaniteraan Hukum Tahun 2019

No.	Jenis Berkas Perkara	Jumlah Permohonan yang diterima
1.	Berkas Perkara Pidana	
2.	Berkas Perkara Perdata Gugatan	
3.	Berkas Perkara Permohonan	
	Jumlah Arsip Baru yang diterima	

4. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

A. Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Tahun 2019

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Hakim		Termasuk Ketua dan Wakil
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan		
3.	Panitera Pengganti		
4.	Jurusita		
5.	Jurusita Pengganti		
	Total		

B. Sumber Daya Manusia bidang Struktural Tahun 2019

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Struktural kesekretariatan		
2.	Staff Administrasi		
	Total		

C. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

JABATAN/PO SISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim											
Pejabat Struktural											
Pejabat Fungsional											
Panitera Pengganti											
Jurusita											
Jurusita Pengganti											
Staf Administrasi											
Total											

D. Kebutuhan / Usulan Permintaan SDM Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH YANG DIMINTA	KETERANGAN
1	Staf Kepaniteraan Perdata		
2	Staf Kepaniteraan Pidana		

3	Staf Kepaniteraan Hukum		
4	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala		
5	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan		
6	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan		
	TOTAL		

- E. Promosi dan Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2019
- F. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong selama Tahun 2019
- G. Kebijakan Internal Tahun 2019 (Surat Keputusan Ketua /Wakil Ketua / Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA)

5. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- A. Tata persuratan, kearsipan dan perpustakaan
 - Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2019 adalah sebesar buah surat sedangkan untuk surat keluar sebesar buah surat.
 - Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2019 sebesarbuku.
- B. Barang Milik Negara
 - Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Cibinong sebesar per 31 Desember 2019 sebesar **Rp**..... ,-
 - Berikut Neraca Pengadilan Negeri Cibinong per 31 Desember 2018
 - Dipa 01 senilai **Rp**.,-
 - Dipa 03 senilai **Rp**..... ,-
 - Tanah senilai **Rp**.,-
- C. Asset Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Cibinong

No	Keterangan Tanah	Luas	Nilai Perolehan / Taksiran (Rp)	Alamat	Bukti Kepemilikan
1	Tanah Gedung Kantor	5.315 m2		Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 42 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 11/09/2009
2	Tanah Rumah Dinas	995 M2		Jl. Kesadaran Rt.02/Rw.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 2 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik

					Indonesia, tanggal 25/10/1997)
3	Tanah Rumah Dinas	2.393 m2		Jl. Sirojul Munir/Kp. Cikempong Rt.002/Rw.09, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 6298 (a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 09/6/2014)
4	Tanah Kantor PN. Cibinong Hibah dari Pemkab. Bogor	2.000 m2		Jl. Tegar Beriman No.05, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	Sertifikat Hak Pakai No. 48 An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI tanggal 27/09/2013

D. Data Kendaraan Roda 4 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

No	Merk/Type Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nilai Perolehan	Keterangan /Pengguna
1	Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2008	2008	F 1342 F	Rp.160.868.328,-	
2	Mobil Toyota Kijang KF 83 LSX Tahun 2003	2003	F 1158 F	Rp.118.726.000,-	
3	Mobil Toyota Kijang KF 83 LGX Tahun 2004	2004	F 3 F	Rp.110.210.000,-	
4	Mobil Sedan Proton Tahun 2010	2010	F 1224 G	Rp.152.274.000,-	
5	Mobil Toyota Avanza Tahun 2011	2011	F 1533 F	Rp.168.500.000,-	
6	Mobil Toyota Fortuner	2014	F 1219 G		
7	Mobil Mitsubishi Outlander	2012	F 1690 F		

E. Data Kendaraan Roda 2 Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2019

No	Merk/Type Kendaraan	Tahun	Nomor Polisi	Nilai Perolehan	Keterangan/ Pengguna
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

F. Pengelolaan Keuangan

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 31-12-2019	%	Sisa Anggaran 31-12-2019
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)				
		Belanja Barang (52)				
		Belanja Modal (53)				
2	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)				

6. Sub Bagian PTIP

- a. Jaringan
 - 1) Modem ADSL :
 - 2) Jumlah HUB/SWITCH : Buah
 - 3) Jumlah Wireless Router : Buah
- b. Server Aplikasi SIPP
 - 1) Type Model : Fujitsu Premergy RX 1330 M1

- 2) Processor : Intel Xeon 3.06 GHz
- 3) Memory : 2x4 Gb
- 4) Harddisk : 2x300 Gb
- 5) Sistem Operasi : Linux Centos

c. Webhosting

- 1) Nama Webhosting :
- 2) Bandwith :
- 3) Disk Space :

**SK PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN
2019**



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR W11-U20/6/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien, dan efektif, telah tersusun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan disusun dalam bentuk narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja peradilannya yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A akan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 selambat-lambatnya bulan Januari 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk panitia untuk mengumpulkan data, menyusun narasi, data, dan grafik, serta menyelenggarakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A;

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, menyeleksi, menyusun narasi yang diperlukan, mengoreksi laporan dari masing-masing bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
 2. Memastikan laporan akhir dari masing-masing bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A telah tersusun menjadi laporan pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;
 3. Memastikan finalisasi laporan pelaksanaan kegiatan tersebut hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Acara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A secara tepat pada waktunya;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Cibinong
Pada Tanggal 08 Januari 2020

Q KETUA PENGADILAN NEGERI
CIBINONG KELAS I A, ✓

IRFANUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19630808 199212 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
4. Arsip.-

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A
Nomor : W11-U20/6/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2020
Tanggal : 08 JANUARI 2020

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**

Pelindung/Penasihat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Ketua : Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.
Sekretaris : Budi Wantoro, S.H., M.H.
Bendahara : Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.

Seksi Penyusunan Narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

**Koordinator : 1. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. (Kepaniteraan)
2. Budi Wantoro, S.H., M.H. (Keseekretariatan)**

Anggota : 1. Noverini, S.H., M.H.
2. Tasdik, S.H., M.H.
3. Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.
4. Linda Cahyati
5. Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., M.Si., M.Kom.
6. Riyanto, S.H.

Seksi Acara

:

Koordinator : Indra Meinantha Vidi, S.H.

Anggota : 1. Lucy Ermawati, S.H., M.H.
2. Tira Tirtona, S.H., M.Hum.
3. Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.
4. Noverini, S.H., M.H.
5. Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., M.Si., M.Kom.
6. Niken Irawati, S.H., M.H.
7. Achmad Nurjaman, S.H., M.H.
8. Zuherma, S.H.
9. Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.
10. Sri Gusliawatni, S.H.
11. Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Seksi Dokumentasi/Publikasi

Koordinator : Nusi, S.H., M.H.

Anggota : 1. Wungu Putro Bayu K., S.H., M.H.
2. Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.
3. Aris Sunaryo
4. Muhamad Agung Suprandi

Seksi Konsumsi

Koordinator : Liena, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dra. Rr. Wahyuningtyas
2. Puji Asih, S.H., M.H.
3. Eti Sugiarti
4. Suprapti
5. Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.
6. Eva Trisnawati, S.H.
7. Minati Indriani, S.H.
8. Suci Handayani, A.Md.
9. Masni, S.H., M.Kn.
10. Sonya Ovelya

Seksi Perlengkapan, Dekorasi, dan Undangan :

Koordinator : Amran S. Herman, S.H., M.H..

- Anggota :
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Ayu Triana Listiati, S.H., M.H. | 6. Irene Isabella N., S.H. |
| 2. Linda Cahyati | 7. Abdul Choir |
| 3. Riyanto, S.H. | 8. Balqis Nabillah |
| 4. Dimas Lingga Wicaksana, S.H. | 9. Agung Devyanto, A.Md. |
| 5. Gabriela Yastika P., S.Psi. | 10. M. Akbar Sudrajat |

Seksi Keamanan :

Koordinator : Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

- Anggota :
- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Tasdik, S.H., M.H. | 4. Tansidi, S.H. |
| 2. Sukirno, S.IP., S.H. | 5. Rizal Abdjul |
| 3. Iman Hanafi, S.H. | 6. Satpam |

Tim Pendukung

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) DIPA
2. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Non DIPA

 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, 

IRFANUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19630808 199212 1 001

The background of the cover features a dark blue sky with wispy white clouds at the top. The main title is centered in a bold, yellow, sans-serif font. At the bottom, there is a decorative wavy line composed of three parallel yellow lines.

**RAPAT PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN
2019**



PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong - Kab. Bogor 16915
Telp. (021) 87905153 - 87905154, Fax. 87905153
Website : www.pn-cibinong.go.id e-mail : info.pncibinong@gmail.com

Cibinong, 03 Januari 2020

Lampiran : -

Perihal : Rapat Penyusunan dan
Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2019
Pengadilan Negeri Cibinong

Yth. Seluruh Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2019

Pada Pengadilan Negeri Cibinong

Di -

Tempat

bersama ini diberitahukan kepada para Seluruh Panitia Penyusunan dan
Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 pada Pengadilan
Negeri Cibinong untuk mengikuti Rapat mengenai Penyusunan dan
Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.
yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 Januari 2020
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Sidang Kusumah Atmaja
Jalan Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong, Kabupaten Bogor

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, dimohon untuk hadir tepat pada
waktunya.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Irfanudin, S.H., M.H.
NIP. 19630808 199212 1 001





LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA

Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab. Bogor 16915
Tlp : (021) 87905154 Fax : 87905154 - 87905808
Website : www.pn-cibinong.go.id email : info.pncibinong@gmail.com